

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

KURNIATI
1702110289



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 24 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD IRBAWI
NPM : 1702120039

Dengan judul:

**PENGARUH PRILAKU KEPEMIMPINAN BERORIENTASI HUBUNGAN, PROMOSI
JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA
ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Manajemen

Suryani Murad, SE., M.Si
NIK. 19720205 200103 2 001

Pembimbing I

Husnaina Mailisa Safitri, B.M.(Hons), MM
NIK. 19870913 201309 2 001

Pembimbing II

yuslaidar Yusuf, SE., M.Si
NIK. 19700620 200005 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 24 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD IRBAWI
NPM : 1702120039

Dengan judul:

**PENGARUH PRILAKU KEPEMIMPINAN BERORIENTASI HUBUNGAN, PROMOSI
JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA
ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 05 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Agus Ariyanto, SE, M.Si
NIK. 19760824 201112 1 001

Anggota

Husnaina Mailisa Satri, B.M. (Hons), MM
NIK. 19870913 201309 2 001

Anggota

Yustaidar Yusuf, SE, M.Si
NIK. 19700620 200005 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen

Suryani Murad, SE, M.Si
NIK. 19720205 200103 2 001

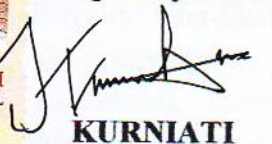
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan




KURNIATI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **KURNIATI**
NPM : 1702110289
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Banda Aceh, 10 Maret 2022
Yang Menyatakan,



KURNIATI

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, ketabahan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Banda Aceh Tahun 2019-2021”. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

1. Terimakasih kepada Kedua orang tua, Ayahanda Alm Ali Basyah, Ibunda Nurainon, S.Pd yang selalu memberikan doa dan restunya kepada penulis
2. **Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh,
3. **Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA** selaku Ketua jurusan program studi Akuntansi Fakultas Muhammadiyah Aceh.
4. **Ibu Irmawati, SE., M.Si**, selaku pembimbing I Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Emi Suryani Nst, SE., M.Si** selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

6. Kepada Suami tercinta Wirza Fahmi, SH, MH, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
7. Ananda tercinta Ahmad Muqil Adhfar yang menjadi semangat bagi penulis
8. Tak lupa pula terimakasih kepada Ayah Mertua Hassan dan Ibu Mertua Rohanna yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Untuk mereka Abang Nurul Liansyah, SE, Mirza Fahmi, SH, kakak Nurina, SE, Lisa Julaini, S.Pd, Adik ipar Maulida, SE dan Hendra, SH yang juga menjadi penyemangat
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika buka atas kehendaknya

Banda Aceh, Maret 2022

KURNIATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iiiv
ABSTRAK	iiiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 8
2.1. Landasan Teoritis	8
2.1.1 Anggaran	8
2.1.1.1 Manfaat dan Fungsi Anggaran	9
2.1.1.2 Penyerapan Anggaran	10
2.1.1.3 Indikator Anggaran	12
2.1.2 Perencanaan	13
2.1.2.1 Pengertian perencanaan	13
2.1.2.2 Manfaat Perencanaan	15
2.1.2.3 Indikator Perencanaan	15
2.1.3 Sumber Daya Manusia	17
2.1.3.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	19
2.1.3.2 Indikator Sumber Daya Manusia	20
2.1.4 Regulasi	21
2.1.4.1 Indikator regulasi	21
2.2. Penelitian Sebelumnya	22
2.3. Kerangka Pemikiran	26
2.3.1 Hubungan Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja	26
2.3.2 Hubungan Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja	27
2.3.3 Hubungan regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja	28
2.4. Hipotesis	29

BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1.	Desain Penelitian	31
3.1.1	Tujuan Studi	31
3.1.2	Jenis Investigasi	31
3.1.3	Horizon Waktu	31
3.1.4	Unit Analisis	32
3.2.	Populasi dan Sampel	32
3.3.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.4.	Definisi dan Operasional Variabel	34
3.5.	Teknik Analisis Data	36
3.6.	Pengujian Data	37
3.6.1	Pengujian Validitas	37
3.6.2	Pengujian Reliabilitas	38
3.7	Pengujian Hipotesis	38
3.7.1	Uji Simultan	39
3.7.2	Uji Parsial	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Hasil Penelitian	40
4.1.1	Gambaran Umum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh	
4.1.2	Karakteristik Responden	41
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	43
4.2.1	Perencanaan	43
4.2.2	Sumber daya manusia	44
4.2.3	Regulasi	45
4.2.4	Penyerapan Anggaran	46
4.3	Hasil Pengujian Data	48
4.3.1	Pengujian Instrumen	48
4.3.2	Regresi linier Berganda	51
4.3.3	Koefesien Determinasi	52
4.3.4	Hasil Pengujian Hipotesis	52
4.4	Pembahasan	54
4.4.1	Pembahasan Pengaruh Perencanaan, Sumber daya manusia dan Regulasi Terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh	54
4.4.2	Pembahasan Perencanaan terhadap Serapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh	55

4.4.3	Pembahasan Pengaruh Sumber daya manusia Terhadap Serapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh.....	55
4.4.4	Pembahasan Pengaruh Regulasi Terhadap Serapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Dan Realisasi Badan Kepegawaian Negara Provinsi Aceh.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	32
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	33
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel	34
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	41
Tabel 4.2 Perencanaan	43
Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia	44
Tabel 4.4 Regulasi	45
Tabel 4.5 Penyerapan Anggaran	46
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas	48
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas	50
Tabel 4.8 Coefficients	51
Tabel 4.9 Model Summary	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	29

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL
XIII BANDA ACEH**

KURNIATI
1702110289

Pembimbing 1) : Irmawati, SE, M.Si, Ak. CA
Pembimbing 2) : Emmi Suryani Nst, SE., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XIII Banda Aceh yang mengelola dibidang anggaran yaitu sebanyak 55 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstanta (α) sebesar 4,792, Koefesien regresi variabel perencanaan sebesar 0,199, Koefesien regresi variabel sumber daya manusia sebesar 0,132, Koefesien regresi variabel regulasi sebesar 0,922. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh.

Kata Kunci : *perencanaan, sumber daya manusia, regulasi dan serapan anggaran belanja*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001 memberikan banyak perubahan berupa terjadinya pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan juga peningkatan pendanaan dari pusat ke daerah dalam rangka penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 dijelaskan pengertian Anggaran Berbasis Kinerja yaitu “Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting karena merupakan alat ekonomi terpenting

yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2013:63). Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Putri, 2015). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Mahmudi, 2013:147).

Pemerintah belum menetapkan standar keminiman penyerapan APBD, ada beberapa daerah yang memiliki fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat memiliki serapan anggaran yang rendah apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Ellen, 2013:118).

Berdasarkan hasil opini yang di keluarkan oleh BPK, lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Fenomena ini juga terjadi pada Pemerintah Aceh. sebagai gambaran selama periode tahun anggaran, di laporan realisasi anggaran pemerintah daerah mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di kas daerah (BPKP, 2021). Berikut dapat kita lihat laporan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Negara provinsi Aceh tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Dan Realisasi Badan Kepegawaian Negara
Provinsi Aceh tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	Rp. 4.542.281.000	Rp. 4.371.894.393	96,2%
2	2020	Rp. 5.026.902.000	Rp. 4.963.216.632	98,7%
3	2021	Rp. 6.256.655.000	Rp. 5.714.374.676	91,3%

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Provinsi Aceh (2022)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat pagu anggaran (alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Negara) pada Badan Kepegawaian Negara di tahun 2019 pagu anggaran Rp. 4.542.281.000 dengan realisasi Rp. 4.371.894.393. Selisih anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.170.386.607. dengan demikian realisasi anggaran yang tercapai yaitu 96,2%. Ditahun 2020, pagu akhir anggaran meningkat sebesar Rp.5.026.902.000 dengan realisasi Rp. 4.963.216.632.

sehingga realisasi anggaran hanya 98,7%. Di tahun 2021 nilai anggaran yang dikucurkan pemerintah kepada Badan Kepegawaian Negara Provinsi Aceh sangat besar yaitu sebesar Rp.6.256.655.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.714.374.676. angka realisasi sebesar 91,3%.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur. Anggaran di sektor publik berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi serapan anggaran pertama faktor perencanaan, dimana perencanaan merupakan unsur penting di dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Faktor yang kedua sumber daya manusia, kekurangan Sumber Daya manusia yang berkualitas baik pejabat pengelola maupun staf dapat mengakibatkan terlambatnya penyerapan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggrannya. Jika SDM

kurang kompeten maka serapan anggaran kemungkinan dapat menjadi rendah. Berdasarkan teori semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu satker dalam menjalankan program dan kegiatan maka serapan anggaran akan semakin baik karena SDM nya mengerti tugas pokok dan fungsinya. Didalam pelaksanaan pengelola keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi penyerapan anggaran dan faktor yang ketiga yaitu regulasi. Dimana regulasi mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Mahmudi, 2013:33).

Penelitian tentang masalah serapan anggaran sudah sering dilakukan, diantaranya adalah Ruhmaini (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa realisasi penyerapan belanja daerah sampai dengan akhir tahun anggaran masih dibawah target. Salamah (2018) meneliti Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan pengembangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada daerah penelitian, unit analisis, dan periode waktu penelitian.

Dari permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
2. Apakah perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
3. Apakah sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
4. Apakah regulasi secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat apakah perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
2. Untuk melihat apakah perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
3. Untuk melihat apakah sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

4. Untuk melihat apakah regulasi secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan para peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian sejenis terkait dengan penyerapan anggaran dimasa yang akan datang

- b) Bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, sebagai gambaran dan masukan yang positif dalam mengelola anggaran agar berjalan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian penulis membatasi hanya pada factor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan Teoritis

2.1.1. Anggaran

Menurut Mardiasmo (2013:122) definisi anggaran Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara”

Pengertian anggaran menurut Nafarin (2016:9) adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu tertentu. Sedangkan Bastian (2014:164) mengemukakan pengertian anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2013:61) mengartikan anggaran berbasis kinerja adalah : merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan ran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Bastian (2014:19) mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “*output*” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi”.

Solihin (2013:24) mengemukakan Anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

Berdasarkan teori, Anggaran berbasis kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Renja-SKPD disetiap unit-unit kinerjanya didalam suatu instansi pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatan anggaranya kepada DPR dan Masyarakat luas.

1.1.1.1 Manfaat dan Fungsi Anggaran

Penyusunan anggaran operasi mempunyai empat tujuan utama (Anthony and Govindarajan, 2014:90):

1. Untuk menyesuaikan rencana strategis.
2. Untuk membantu mengoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
4. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

Mardiasmo (2016: 63) menjelaskan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*),

Menurut Mahmudi (2013:424), sebuah sistem penganggaran

memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi.

1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan.
2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan.
3. Menyediakan standar evaluasi kinerja.
4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi.

1.1.1.2 Penyerapan Anggaran

Untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17/2013 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan

pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN.

Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu satker menjadi tolak ukur kinerja dari satker tersebut. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan

pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100% dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi dana dan/atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyerapan anggaran dapat diartikan pencapaian rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

1.1.1.3 Indikator Penyerapan Anggaran

Pemerintah daerah perlu segera melakukan penyerapan anggaran karena sudah menjelang akhir di setiap tahun anggaran, Musuh paling berbahaya dalam pengelolaan anggaran ialah penyerapannya yang lamban. Pengukuran kinerja (tolak ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Halim (2014:116).

Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (*input*) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan, peran

Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Halim (2014).

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran agar penyerapan anggaran menjadi efektif. Menurut Novijaya (2013:178) indikator penyerapan anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Perencanaan
2. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran
3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan
4. Ketepatan jadwal penarikan anggaran
5. Evaluasi

2.1.2 Perencanaan

2.1.2.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (*planning*) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapainya tujuan organisasi (Ellen, 2013:98). Sedangkan menurut Nafarin (2016:87), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan penganggaran berkaitan dengan tujuan organisasi, alokasi tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab pelaksanaannya

(Solihin, 2013:99). Oleh karena itu, kegagalan dalam perencanaan penganggaran akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah. Faktor dari kurang baiknya perencanaan penyusunan anggaran yang berimbas pada program kerja suatu instansi pemerintah.

Munandar (2012;114) menjelaskan bahwa aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran. Penelitian Herriyanto (2012) juga menemukan bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Persiapan dokumen perencanaan anggaran bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan dokumen pembangunan nasional strategis yang menyeluruh yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan anggaran (Halim, 2014).

Lillrank (2013) mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kemampuan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia disebabkan oleh terpecahnya proses perencanaan dan alokasi keuangan karena lemahnya kapasitas perencanaan di semua tingkatan dalam sistem. Pendekatan top-down yang diterapkan di tingkat pusat tanpa kejelasan peran dan tanggung jawab, arahan yang tidak tepat dan komunikasi yang buruk menyebabkan ketidakpastian dan menghambat proses perencanaan bagi Instansi Pemerintah. Kelancaran serta keberhasilan organisasi untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien ditentukan oleh adanya

perencanaan yang matang. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan salah satu fungsi manajemen.

2.1.2.2 Manfaat Perencanaan

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya. Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab. Menurut Siagian (2016:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang. Menurut Halim, (2014:23) ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan

2.1.2.3 Indikator Perencanaan

Sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam

melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan, Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Siagian (2016:90) proses perencanaan dapat ditinjau dari cirri-ciri suatu rencana yang baik, yakni menurut Ellen (2013:90) proses perencanaan dapat ditinjau dari cirri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti
4. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan
5. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan. Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara.

2.1.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah bisa berupa staff, informasi, kewenangan, fasilitas dan lain-lain. Menurut Halim (2014:117), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Sumber Daya Manusia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat: (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan; (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan. Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Disetiap Instansi Pemerintah harus mempunyai sumber daya yang terlatih dan mampu menangani tugas-tugasnya.

Staf juga harus dilengkapi dengan uraian tugas yang tepat (Mahmudi, 2013:85). Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Untuk membentuk aparatur yang sempurna diperlukan upaya peningkatan manajemen pegawai negeri sipil yang diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen pegawai negeri sipil, baik pegawai negeri sipil pusat maupun pegawai negeri sipil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia.

Keterampilan individu juga menjadi nilai tambah bagi seseorang. Keterampilan individu seorang PNS mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang pengetahuan yang diberikan dari waktu ke waktu. Hal ini diterima secara luas bahwa staf berpendidikan tinggi dan secara teknis yang berkualitas lebih mudah menerima pembauran dan mampu mentransformasi pengetahuan eksternal yang tersedia (Mahmudi, 2013:85).

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM untuk mengelola anggaran. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik. Kualitas SDM yang rendah akan berpotensi menghambat pelayanan administrasi, contohnya bagian keuangan dalam pembuatan SPM dan panitia pengadaan barang dan jasa dalam melakukan proses pelayanan (lillrank, 2013:211).

Herriyanto. (2012:101), Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan alternatif solusi kebijakan, adalah : 1) memberikan reward berupa honorarium yang lebih besar dari honorarium yang telah ditetapkan sebelumnya guna untuk mendorong motivasi; 2) Memberikan dorongan motivasi berupa penghargaan baik berupa materi maupun inmateri.

2.1.3.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Adapun penjelasan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Flippo dalam Priansa (2014:32) yaitu :

- a. Pengadaan tenaga kerja adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keperluan perusahaan.
- b. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan modal karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masa kini maupun masa depan.
- c. Kompensasi ialah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil (sesuai dengan prestasi kerjanya) dan layak (dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi).
- d. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercapainya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.
- e. Pemeliharaan adalah untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun.
- f. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumberdaya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah kegiatan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.
- g. Pemberhentian adalah putusya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan dan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.

Berdasarkan uraian tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

2.1.3.2 Indikator Sumber Daya Manusia

Salah satu institusi atau organisasi yang berperan dalam menghasilkan SDM adalah pendidikan. Mengacu kepada kebutuhan SDM dan terbukanya lapangan kerja menjadikan semakin banyaknya institusi pendidikan yang berupaya menghasilkan SDM yang handal Mustafa (2011:8). Untuk mengukur kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satu pendekatan adalah dengan melihat pengakuan akan kompetensi atau keahliannya. Pengakuan berarti sebuah pernyataan dari pihak lain yang dibuktikan dengan hasil karya atau proses pengembangan kemampuan, melalui proses pengembangan diri dan sebuah pengujian. Mahmudi (2013:201) mengungkapkan, penilaian dalam mengukur kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mencakup sumber daya manusia yang memenuhi berbagai kriteria dalam ukuran-ukuran di atas yaitu meliputi:

1. Memiliki kemampuan Intelektual (Kecerdasan) Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah.
2. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
3. Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang tersedia di tingkat local, nasional maupun internasional.
4. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
6. Kemampuan Psikologis (mental) Kemampuan psikologis (mental) adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberi penilaian baik-buruk suatu keadaan/kondisi didalam melaksanakan pekerjaan.

2.1.4 Regulasi

Regulasi atau peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Mahmudi, 2013:33). Menurut Mardiasmo (2013:183) regulasi dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berupa undangundang, peraturan pemerintah, peratuarn presiden, peraturanmenteri dan aturan hukum lainnya. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada.

Tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai (Munandar, 2013).

2.1.4.1 Indikator regulasi

Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wuju kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan

permasalahan yang ada. Dalam organisasi akuntansi sektor publik, tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai (Lilrank, 2013:92).

Menurut Solihin (2013:107), ada beberapa indikator dari regulasi akuntansi sektor publik yaitu :

1. Regulasi perencanaan publik
2. Regulasi anggaran publik
3. Regulasi pelaksanaan
4. Regulasi pengadaan
5. Regulasi laporan pertanggungjawaban

2.2 Penelitian Sebelumnya

Ruhmaini (2018) dengan judul analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan kesimpulan penelitian ini adalah serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.

Salamah (2018) dengan judul strategi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hasil penelitian menunjukan kriteria pertama adalah faktor regulasi, kedua kriteria faktor perencanaan anggaran, dan ketiga kriteria faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Alternatif prioritas program yakni diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran. Selanjutnya yaitu adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya), serta adanya kebijakan penyerapan anggaran.

Bahri (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cirebon. hasil penelitian menunjukan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Endrayani (2014) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi kasus pada dinas kehutanan upt kph bali tengah kota singaraja) hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R^2 yang diperoleh sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja, yang mana terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Anton (2016) dengan judul Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan untuk menunjang akuntabilitas publik pada Badan

Lingkungan Hidup Kota Manado. Yang dibuktikan dengan hasil hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruhmaini (2018)	Analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.	Memiliki variabel independen dan variabel dependen yang sama, yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan variabel Akuntabilitas	Memiliki perbedaan populasi, sampel serta tempat penelitian. Teori yang digunakan pun banyak dari literatur yang berbeda
2.	Salamah (2018)	strategi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kriteria pertama adalah faktor regulasi, kedua kriteria faktor perencanaan anggaran, dan ketiga kriteria faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Alternatif prioritas program yakni diadakan sosialisasi	Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu variabel Akuntabilitas Kinerja	Memiliki perbedaan variabel independen, penelitian Kusumaningrum dengan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan

			mengenai mekanisme pencairan anggaran. Selanjutnya yaitu adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya), serta adanya kebijakan penyerapan anggaran.		Sistem Pelaporan sedangkan penelitian ini meneliti dengan variabel independen Anggaran berbasis kinerja. populasi, sampel serta tempat penelitian juga berbeda. Teori yang digunakan pun banyak dari literatur yang berbeda
3.	Anton (2016)	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan untuk menunjang akuntabilitas publik pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Yang dibuktikan dengan hasil hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.	Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu variabel Akuntabilitas Kinerja dan independen yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja	Memiliki perbedaan populasi, sampel serta tempat penelitian. Teori yang digunakan pun banyak dari literatur yang berbeda
3.	Endrayani (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai koefisien determinasi atau R^2 yang diperoleh sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas	Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu variabel Akuntabilitas Kinerja dan independen yaitu	Memiliki perbedaan populasi, sampel serta tempat penelitian. Teori yang digunakan pun banyak dari

		(studi kasus pada dinas kehutanan upt kph bali tengah kota singaraja)	Kehutanan UPT KPH Bali Tengah	penerapan anggaran berbasis kinerja	literatur yang berbeda
4.	Bahri (2012)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon	Hasil penelitian menunjukan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Memiliki variabel independen dan variabel dependen yang sama, yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan variabel Akuntabilitas	Memiliki perbedaan populasi, sampel serta tempat penelitian. Teori yang digunakan pun banyak dari literatur yang berbeda

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Bastian, 2014).

Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan.

2.3.2 Hubungan Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

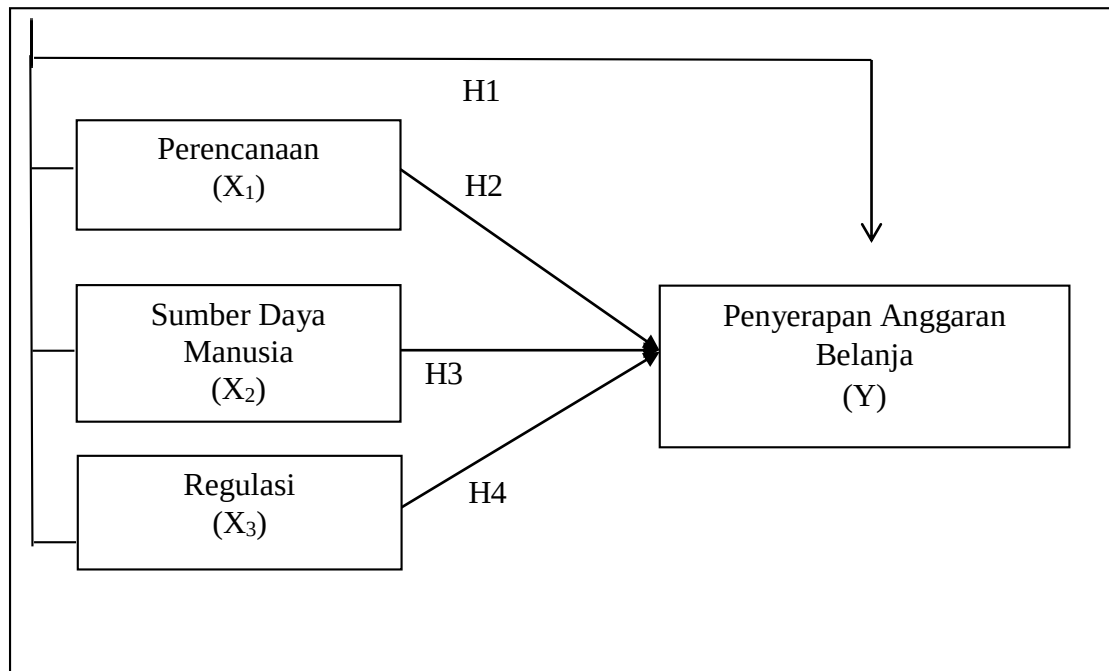
Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu perlu rasanya untuk lebih menekan kompetensi apa yang harus dikuasai sumber daya manusia dalam organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas yang berdampak langsung terhadap pengalaman.

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Anton, 2016).

2.3.3 Hubungan Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Sistem regulasi keuangan daerah merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Nilawati, 2009 dalam Rasdianto dkk, 2014). Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja.

Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas. Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek penelitian yang dilakukan (Arikunto, 2016). Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
- H₂ : Perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

- H₃ : Sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
- H₄ : Regulasi secara parsial berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017: 152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi empat elemen yaitu:

3.1.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh.

3.1.2 Jenis Investigasi

Penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen yaitu perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

3.1.3 Horizon waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot*, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk kepada kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada pegawai secara individu.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti poin (Sekaran, 2017:129). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Arikunto, 2016:92). Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XIII Banda Aceh yang mengelola dibidang anggaran yaitu sebanyak 55 orang. Karena jumlah sampel kurang dari 100, maka peneltian ini menggunakan metode sensus.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Bidang	Populasi
1	Kepala Kantor	1
2	Administrator	5
3	Pengawas	17
4	Fungsional tertentu	16
5	Fungsional Umum	16
Total		55

Sumber
: Badan

Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XIII Banda Aceh, 2022

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang telah dipersiapkan kepada seluruh responden yaitu 55 Pegawai. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2016:101). Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kuesioner tersebut selanjutnya disebarkan kepada seluruh responden.

Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut katagori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnetude*) perbedaan preferensi antar individu. Dimana jawaban masing-masing responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin (Sekaran, 2017:129). Skala pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Definisi dan operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnitude*) perbedaan preferensi antar individu (Sekaran, 2017:117). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Variabel : Dependen				
Penyerapan Anggaran (Y)	Salah satu tahap dari siklus anggaran, yang dimulai dari perencaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran (Mardiasmo, 2013: 176)	1. Perencanaan 2. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran 3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan 4. Ketepatan jadwal penarikan anggaran 5. Evaluasi	Likert	1 – 5

Variabel : Independen				
Perencanaan (X ₁)	Kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya (Bastian, 2010)	1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi. 3. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti 4. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan 5. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan (Ellen, 2013:90)	Likert	1 – 3
Sumber Daya Manusia (X ₂)	Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya (Sutrisno, 2010)	6. Memiliki kemampuan Intelektual (Kecerdasan) 7. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi 8. Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan Memiliki penguasaan bahasa 9. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan	Likert	1 – 3

		teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi 10. Kemampuan Psikologis (mental) Kemampuan psikologis (mental) (Mahmudi, 2013:201)		
Regulasi (X3)	Sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Handayani, 2017)	1. Regulasi perencanaan publik 2. Regulasi anggaran publik 3. Regulasi pelaksanaan 4. Regulasi pengadaan 2. Regulasi laporan pertanggungjawaban (Solihin, 2013:107)	Likert	1 – 3

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresinya yaitu (Sugiyono, 2013:204) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penyerapan Anggaran

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Perencanaan

X_2 = Sumber Daya Manusia

X_3 = Regulasi

e = Standar Error

3.6 Pengujian Data

Sebelum data diolah lebih lanjut, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen.

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coefficient of Corelation* dengan bantuan SPSS versi 23,0 (*Statistical Package for Sosial Science*). Apabila r -hitung $>$ dari r -tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment* yang memiliki tingkat signifikansi dibawah 5% (Sugiyono, 2013:103).

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner. Untuk mengukur reliabilitas digunakan *coeffisien cronbath alpha* dengan koefisien alphanya lebih besar dari 0,60 (Sekaran, 2017:182).

3.7 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka dilakukan uji-t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu melihat dari uji beta.

3.7.1 Uji Simultan

H_1 : jika nilai koefisien β_1 ($i=1,2,3$) = 0; maka H_0 diterima, artinya perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_1 : jika nilai koefisien β_1 ($i=1,2,3$) $\neq 0$; maka H_a diterima, artinya perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

3.7.2 Uji Parsial

H_2 : jika nilai koefisien $\beta_1 = 0$; maka H_0 diterima, artinya secara parsial perencanaan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_2 : jika nilai koefisien $\beta_2 = 0$; maka H_a diterima, artinya secara parsial perencanaan berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_3 : jika nilai koefisien $\beta_1 = 0$; maka H_0 diterima, artinya secara parsial sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_3 : jika nilai koefisien $\beta_2 = 0$; maka H_a diterima, artinya secara parsial sumber daya manusia berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_4 : jika nilai koefisien $\beta_1 = 0$; maka H_0 diterima, artinya secara parsial regulasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_4 : jika nilai koefisien $\beta_2 = 0$; maka H_a diterima, artinya secara parsial regulasi berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh dulunya bernama Dinas Cipta Karya dengan Kepala Dinas yaitu Bapak Jalaluddin, ST, MT. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terletak di Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga. Dengan jumlah pegawai sebanyak 345 orang, baik itu Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Kontrak (2017).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh memiliki visi dan misi dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Aceh, adapun visi yang ingin di capai adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Model Kota Madani yang Gemilang” Melalui Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Misi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yaitu lebih fokus pada Misi “Memperluas inovasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan”, Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.

4.1.2 Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden dalam hal ini yaitu pegawai bagian keuangan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh yang berjumlah 55 orang. Peneliti mengambil kembali kuesioner untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah menggunakan program SPSS versi 22.0.

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 55 kuesioner, semuanya telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%, seluruh kuesioner yang disebarkan kembali semuanya, sehingga sampel akhir penelitian berjumlah 55 (n=55). Karakteristik responden seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis kelamin • Laki-laki • Perempuan	31 24	56% 44%
2.	Usia • ≤ 25 Tahun • > 25 – 35 Tahun • > 35 – 45 Tahun • > 45 Tahun	11 11 33	20% 20% 60%
3.	Pendidikan Terakhir • DIII	14	25%

	• S1 • Pasca Sarjana • Lainnya	29 12 -	53% 22% -
4.	Masa Kerja • < 5 tahun • 5 – 10 tahun • 10 – 15 tahun • > 15 tahun	4 27 13 11	7% 49% 24% 20%
Jumlah		55	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin pria lebih mendominasi pegawai bidang anggaran pada Badan Kepegawaia Negara Banda Aceh yaitu sebanyak 56% atau 31 orang berjenis kelamin laki-laki dan 56% atau 24 orang berjenis kelamin perempuan. 11 orang atau 20% berusia > 25 – 35 tahun dan berusia > 35 – 45 tahun, 33 orang atau 60% berumur lebih dari 45 tahun. Ditinjau dari pendidikan terakhir responden, diketahui bahwa dari seluruh responden penelitian tersebut sebanyak 14 orang berpendidikan DI/DII/DIII (25%), Sarjana berjumlah 29 orang (53%), dan Pasca Sarjana (S2) berjumlah 12 orang (22%).

Dan jika dilihat dari masa kerjanya, 4 orang atau 7% dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, 27 orang atau 49 dengan masa kerja 5 - 10 tahun, 13 orang atau 24% dengan masa kerja 10 – 15 tahun dan 11 orang atau 20% dengan masa kerja lebih dari 15 tahun.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Perencanaan

Variabel ini dijabarkan dalam 5 (lima) pernyataan, hal ini terlihat seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perencanaan

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Perencanaan yang telah di susun di tahun anggaran yang akan berjalan tidak menghambat tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya	0	0	0	0	0	0	29	52.7	26	47.3	4.473
2	Perencanaan dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi	0	0	0	0	0	0	26	47.3	29	52.7	4,527
3	Perencanaan disertai oleh suatu rincian yang diteliti	0	0	0	0	0	0	31	56.4	24	43.6	4,436
4	Perencanaan tidak terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4,564
5	Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4,564
Rerata												4.513

Berdasarkan Tabel 4.2, maka dapat dijelaskan bahwa variabel perencanaan diperoleh nilai rerata sebesar 4,513 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Perencanaan tidak terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan dan Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko.

4.2.2 Sumber daya manusia

Variabel ini dijabarkan dalam 6 (enam) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sumber daya manusia

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Pegawai memiliki kemampuan Intelektual (Kecerdasan) yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah	0	0	0	0	0	0	29	52.7	26	47.3	4.473
2	Kami memiliki kemampuan Intelektual, sesuai yang dibutuhkan instansi	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4.564
3	Kami sering diberikan pelatihan untuk lebih meningkatkan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan	0	0	0	0	0	0	20	36.4	35	63.6	4.636
4	Pegawai memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing	0	0	0	0	0	0	19	34.5	36	65.5	4.655
5	Latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan kami sesuai dengan tuntutan perusahaan	0	0	0	0	0	0	25	45.5	30	54.5	4.545
6	Kami sering mendapatkan pelatihan psikologis, kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia	0	0	0	0	0	0	25	45.5	30	54.5	4.545

	didalam melaksanakan pekerjaan.											
Rerata												4.570

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat dijelaskan bahwa variabel sumber daya manusia diperoleh nilai rerata sebesar 4.570 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Pegawai memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.

4.2.3 Regulasi

Variabel ini dijabarkan dalam 5 (lima) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Regulasi

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Banda Aceh memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di setiap tahun anggaran	0	0	0	0	0	0	25	45.5	30	54.5	4.545
2	Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam undang-undang yang berlaku	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4,564
3	Kepala Daerah memiliki otorisasi dalam pelaksanaan anggaran	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4,564
4	Pengadaan barang dan jasa harus memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	29	52.7	26	47.3	4.473
5	Kepala Daerah menetapkan peraturan	0	0	0	0	4	7.3	46	83.6	5	9.1	4.018

	daerah mengenai penerimaan laporan pertanggungjawaban mengenai regulasi											
Rerata												4.433

Berdasarkan Tabel 4.4, maka dapat dijelaskan bahwa variabel regulasi diperoleh nilai rerata sebesar 4.433 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah mengenai penerimaan laporan pertanggungjawaban mengenai regulasi.

4.2.4 Penyerapan Anggaran

Variabel ini dijabarkan dalam 5 (lima) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Penyerapan Anggaran

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Hasil penyerapan anggaran menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan Sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan	0	0	0	0	0	0	29	52.7	26	47.3	4.473
2	Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4,564
3	Pemerintah daerah telah mengalokasikan	0	0	0	0	0	0	24	43.6	31	56.4	4,564

	penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan											
4	Penyusunan anggaran telah dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan	0	0	0	0	0	0	29	52.7	26	47.3	4.473
5	Anggaran telah disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (<i>output/outcome</i>) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan	0	0	0	0	4	7.3	46	83.6	5	9.1	4.018
Rerata												4.418

Berdasarkan Tabel 4.5, maka dapat dijelaskan bahwa variabel regulasi diperoleh nilai rerata sebesar 4.418 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Anggaran telah disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Instrumen

a. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coefficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 bahwa hasil pengujian nilai kritis untuk mengukur kedua variabel dalam penelitian ini adalah 0,266. Maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment*. Seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

No	Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (df = N-2)	Keterangan
1	A1	X ₁	0,774	0,266	Valid
2	A2		0,804	0,266	Valid
3	A3		0,758	0,266	Valid
4	A4		0,409	0,266	Valid
5	A5		0,409	0,266	Valid
6	B1	X ₂	0,327	0,266	Valid
7	B2		0,350	0,266	Valid
8	B3		0,805	0,266	Valid
9	B4		0,440	0,266	Valid
10	B5		0,755	0,266	Valid
11	B6		0,631	0,266	Valid
12	C1	X ₃	0,335	0,266	Valid

13	C2		0,829	0,266	Valid
14	C3		0,803	0,266	Valid
15	C4		0,845	0,266	Valid
16	C5		0,354	0,266	Valid
17	D1	Y	0.542	0,266	Valid
18	D2		0.813	0,266	Valid
19	D3		0.790	0,266	Valid
20	D4		0.887	0,266	Valid
21	D5		0.395	0,266	Valid

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya memiliki tingkat signifikansi dibawah 5%, maka item pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r -hitung > nilai r -tabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 responden, jadi nilai r -tabel nya adalah 0,266, dan semua hasil dari kedua variabel mendapat nilai koefesien korelasi lebih dari 0,266, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *cronbach alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga

dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 23.0. seperti terlihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Alpha
Perencanaan (X_1)	5	0,623
Sumber Daya Manusia (X_2)	6	0,699
Regulasi (X_3)	5	0,627
Penyerapan Anggaran (Y)	5	0,677

Berdasarkan Tabel 4.6, maka pengujian reliabilitas dengan *cronbach alpha* terhadap 21 pernyataan yang telah dinilai jawabannya, maka dapat dilihat bahwa alpha untuk variabel perencanaan sebesar 0,623, variabel sumber daya manusia sebesar 0,699, regulasi nilainya 0,627 dan penyerapan anggaran memiliki nilai alpa 0,677. karena memiliki nilai $> 0,6$, mengacu kepada syarat suatu instrumen dikatakan reliabel memiliki alpha $> 0,6$, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

4.3.2 Regresi Linier Berganda

Untuk melihat pengaruh sistem perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi terhadap penyerapan anggaran pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, menggunakan regresi linier berganda. Seperti pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.792	2.450		.323	.748		
X1	.199	.077	.197	2.583	.013	.832	1.201
X2	.132	.082	.123	3.614	.003	.839	1.192
X3	.922	.086	.819	10.753	.000	.835	1.197

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi untuk pengaruh perencanaan dan penerapan sumber daya manusia terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh. Persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut:

$$Y = 4.792 + 0,199X_1 + 0.132X_2 + 0.922X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 4.792 dapat diartikan bahwa tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia dan regulasi, penyerapan anggaran telah ada nilai sebesar 4,792.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel predictor dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Model Summary

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson
					R Square Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.867 ^a	.753	.738	.81991	.753	3	51	.000	2.258

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Koefesien Determinasi (R^2) sebesar 0,867 artinya sebesar 86.7 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (regulasi) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi.

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk keempat rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

H_1 : Nilai F_{hitung} sebesar 51,697 > F_{tabel} sebesar 2,783, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

H_2 : Nilai t_{hitung} sebesar 3,347 > t_{tabel} sebesar 2,947, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya perencanaan berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_3 : Nilai t_{hitung} sebesar 4,487 > t_{tabel} sebesar 2,947, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya sumber daya manusia berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

H_4 : Nilai t_{hitung} sebesar 3,160 > t_{tabel} sebesar 2,947, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya regulasi berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pembahasan Pengaruh Perencanaan, Sumber daya manusia dan Regulasi Terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Konstanta (α) sebesar 4,792 yang berarti jika variabel perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi dianggap konstan, maka besarnya serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh sebesar 47.92%.

Variabel perencanaan dan penerapan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh dengan Konsep Value.

Semakin baik perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi, maka serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh akan semakin meningkat. setiap dilakukan peningkatan perencanaan bagian pengelola keuangan di masing-masing sub bagian pada instansi, maka akan meningkatkan serapan anggaran. Begitu pula dengan adanya sumber daya manusia dan regulasi yang baik, yang juga akan meningkatkan serapan anggaran instansi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2013) yang meneliti mengenai strategi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria pertama adalah faktor regulasi, kedua kriteria faktor perencanaan anggaran, dan ketiga kriteria faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Alternatif prioritas program yakni diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran.

4.4.2 Pembahasan Perencanaan terhadap Serapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa perencanaan berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai Koefesien regresi variabel perencanaan sebesar 0,199, yang berarti bahwa setiap meningkatnya perencanaan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh.

4.4.3 Pembahasan Pengaruh Sumber daya manusia Terhadap Serapan Anggaram Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefesien regresi variabel sumber daya manusia sebesar 0,132, yang berarti bahwa setiap meningkatnya serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh sebesar 1 satuan.

Variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap serapan anggaram pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, dengan adanya sumber daya manusia, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, sehingga serapan anggaran pun akan baik.

4.4.4 Pembahasan Pengaruh Regulasi Terhadap Serapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa regulasi berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefesien regresi variabel sumber daya manusia sebesar 0,922, yang berarti bahwa setiap meningkatnya serapan anggaran pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh sebesar 1 satuan.

Variabel regulasi berpengaruh terhadap serapan anggaram pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh, dengan adanya regulasi, maka akan adanya pembaharuan-pembaharuan syste m yang kurang baik, sehingga serapan anggaran pun akan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
2. Perencanaan berpengaruh terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
3. Sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
4. Regulasi berpengaruh terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh
5. Konstanta (α) sebesar 4,792, Konstanta (α) sebesar 4,792 yang berarti jika variabel perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi dianggap konstan, maka besarnya serapan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh sebesar 47.92%
6. Koefesien regresi variabel perencanaan sebesar 0,199, Koefesien regresi variabel sumber daya manusia sebesar 0,132, Koefesien regresi variabel sumber daya manusia sebesar 0,922 terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan

Kepegawaian Negara (BKN) Aceh terhadap Serapan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengenai responden, agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya, kapasitas nya lebih luas tidak hanya pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh.
2. Menambahkan variabel penelitian sehingga penelitian dapat lebih meyakinkan
3. Kepada Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh agar terus meningkatkan penyerapan anggaran
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh terus memperhatikan perencanaan, sumber daya manusia dan regulasi karena dapat mempengaruhi penyerapan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. (2016). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Anton. (2016). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Skripsi
- Anthony, R.N dan Govindarajan, V. (2014). *Management Control System*. (International Edition). Boston. McGraw-Hill
- Bahri. (2012). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon*. Skripsi
- Bastian, Indra. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit: Erlangga. Jakarta
- Ellen. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Endrayani. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja)*. Skripsi
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim. Abdul & Kusufi Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim. Abdul (2014). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas*. Universitas Brawijaya. Malang. Skripsi
- Handayani. (2017). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan yang melakukan penelitian pada Daerah Seragen dan Klaten*. Universitas Brawijawa. Skripsi.
- Herriyanto. (2012). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi. Universitas Gajayana. Malang. Skripsi.

Lillrank, Almilia. (2013) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Buku 1. Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat.

Mardiasmo, (2013), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.

Mardiasmo, (2016), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Munandar, (2012). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Mustafa. (2011). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Nafarin. (2016). *Good Corporate Governance Dan Kinerja Pegawai Pemerintahan Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar 26-28 juli 2007

Novijaya, A., dan Rohman, A. (2013). *Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja*, Diponegoro *Journal of Accounting*, Vol.2, No.3, Hlm. 1.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Priansa (2014). *Perencanaan & Pengembangan SDM*, Bandung: Alfabeta

Rasdianto. Dkk. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. Skripsi

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah.

Ruhmaini. (2018). analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi

Salamah. (2018). “strategi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Skripsi

Sekaran, Uma (2017) *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Edisi Ke-4, Jilid 2: Jakarta, Salemba Empat.

Solihin. Dadang. (2013). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta PT. Indeks.

Siagian. (2016). Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik , *Buku 1*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, (2013). *Psikologi Abnormal*. Edisi Ke-9: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah propinsi Aceh

KUESIONER

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XIII BANDA ACEH TAHUN 2019-2021

Bapak/Ibu Responden yang Terhormat,

Kuisisioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah untuk skripsi. Agar mendapatkan data bagi penulis untuk dianalisa. Kerahasiaan informasi sangat di jaga. Untuk itu kami mengharapkan bantuan dari seluruh pihak untuk dapat memberikan informasi yang benar untuk keberhasilan penelitian ini.

No. Responden:..... (diisi oleh Penulis)

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (X) sesuai pilihan.

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin Anda

☐

Pria-22

☐

Wanita-33

2. Usia Anda:

☐

25 – 30 Tahun -11

☐

31 - 35 Tahun - 15

☐

> 35 Tahun -29

3. Pendidikan Terakhir

☐

SMA

☐

S1 -36

☐

DI / DII / DIII

☐

Pasca Sarjana 11

4. Masa kerja

☐

< 5 tahun 11

☐

10 – 15 tahun -9

☐

5 – 10 tahun 30

☐

> 15 tahun -5

Untuk setiap pertanyaan dibawah ini, berilah tanda (✓) pada pilihan mengenai sejauh mana saudara/i setuju dengan pernyataan – pernyataan yang diberikan tersebut. Untuk lebih sistematis terhadap jawaban yang akan diberikan, maka disediakan alternatif jawaban yakni sebagai berikut :

Alternatif Pilihan :

- (1) Sangat Tidak Setuju (STS)
- (2) Tidak Setuju (TS)
- (3) Kurang Setuju (KS)
- (4) Setuju (S)
- (5) Sangat Setuju (SS)

Perencanaan (X₁)

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Perencanaan yang telah di susun di tahun anggaran yang akan berjalan tidak menghambat tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya					
2.	Perencanaan dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi					
3.	Perencanaan disertai oleh suatu rincian yang diteliti					
4.	Perencanaan tidak terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan					
5.	Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko					

Sumber Daya Manusia (X₂)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pegawai memiliki kemampuan Intelektual (Kecerdasan) yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah					
2	Kami memiliki kemampuan Intelektual, sesuai yang dibutuhkan instansi					
3	Kami sering diberikan pelatihan untuk lebih meningkatkan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan					

4	Pegawai memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing					
5	Latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan kami sesuai dengan tuntutan perusahaan					
6	Kami sering mendapatkan pelatihan psikologis, kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia didalam melaksanakan pekerjaan.					

Regulasi (X3)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Banda Aceh memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di setiap tahun anggaran					
2	Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam undang-undang yang berlaku					
3	Kepala Daerah memiliki otorisasi dalam pelaksanaan anggaran					
4	Pengadaan barang dan jasa harus memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah					
5	Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah mengenai penerimaan laporan pertanggungjawaban mengenai regulasi					

Penyerapan Anggaran (Y)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Hasil penyerapan anggaran menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan Sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan					
2	Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan					
3	Pemerintah daerah telah mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan					
4	Penyusunan anggaran telah dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan					
5	Anggaran telah disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (<i>output/outcome</i>) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan					

Frequency Table

a1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	52.7	52.7	52.7
	5.0	26	47.3	47.3	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

a2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	26	47.3	47.3	47.3
	5.0	29	52.7	52.7	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

a3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	31	56.4	56.4	56.4
	5.0	24	43.6	43.6	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

a4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

a5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

b1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	52.7	52.7	52.7
	5.0	26	47.3	47.3	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

b2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

b3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	20	36.4	36.4	36.4
	5.0	35	63.6	63.6	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

b4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	19	34.5	34.5	34.5
	5.0	36	65.5	65.5	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

b5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	25	45.5	45.5	45.5
	5.0	30	54.5	54.5	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

b6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	25	45.5	45.5	45.5
	5.0	30	54.5	54.5	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

c1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	25	45.5	45.5	45.5
	5.0	30	54.5	54.5	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

c2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

c3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

c4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	52.7	52.7	52.7
	5.0	26	47.3	47.3	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

c5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	4	7.3	7.3	7.3
	4.0	46	83.6	83.6	90.9
	5.0	5	9.1	9.1	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

d1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	52.7	52.7	52.7
	5.0	26	47.3	47.3	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

d2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

d3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	43.6	43.6	43.6
	5.0	31	56.4	56.4	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

d4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	52.7	52.7	52.7
	5.0	26	47.3	47.3	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

d5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.0	4	7.3	7.3	7.3
	4.0	46	83.6	83.6	90.9
	5.0	5	9.1	9.1	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Correlations

		Correlations					
		a1	a2	a3	a4	a5	X1
a1	Pearson Correlation	1	.751**	.929**	-.121	-.121	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.377	.377	.000
	N	55	55	55	55	55	55
a2	Pearson Correlation	.751**	1	.833**	-.025	-.025	.804**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.854	.854	.000
	N	55	55	55	55	55	55
a3	Pearson Correlation	.929**	.833**	1	-.187	-.187	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.172	.172	.000
	N	55	55	55	55	55	55
a4	Pearson Correlation	-.121	-.025	-.187	1	.630**	.409**
	Sig. (2-tailed)	.377	.854	.172		.000	.002
	N	55	55	55	55	55	55
a5	Pearson Correlation	-.121	-.025	-.187	.630**	1	.409**
	Sig. (2-tailed)	.377	.854	.172	.000		.002
	N	55	55	55	55	55	55
X1	Pearson Correlation	.774**	.804**	.758**	.409**	.409**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.002	
	N	55	55	55	55	55	55

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		b1	b2	b3	b4	b5	b6	X2
b1	Pearson Correlation	1	.393**	-.193	-.614**	-.379**	.133	.327
	Sig. (2-tailed)		.003	.159	.000	.004	.333	.356
	N	55	55	55	55	55	55	55
b2	Pearson Correlation	.393**	1	-.132	-.408**	-.214	.080	.350
	Sig. (2-tailed)	.003		.338	.002	.116	.560	.066
	N	55	55	55	55	55	55	55
b3	Pearson Correlation	-.193	-.132	1	.564**	.828**	.373**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.159	.338		.000	.000	.005	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
b4	Pearson Correlation	-.614**	-.408**	.564**	1	.796**	.028	.440**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000	.840	.001
	N	55	55	55	55	55	55	55
b5	Pearson Correlation	-.379**	-.214	.828**	.796**	1	.267*	.755**
	Sig. (2-tailed)	.004	.116	.000	.000		.049	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
b6	Pearson Correlation	.133	.080	.373**	.028	.267*	1	.631**
	Sig. (2-tailed)	.333	.560	.005	.840	.049		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
X2	Pearson Correlation	.327	.350	.805**	.440**	.755**	.631**	1
	Sig. (2-tailed)	.356	.066	.000	.001	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		c1	c2	c3	c4	c5	X3
c1	Pearson Correlation	1	-.067	-.067	-.160	-.049	.335
	Sig. (2-tailed)		.627	.627	.245	.721	.084
	N	55	55	55	55	55	55
c2	Pearson Correlation	-.067	1	.630**	.833**	-.051	.829**
	Sig. (2-tailed)	.627		.000	.000	.711	.000
	N	55	55	55	55	55	55
c3	Pearson Correlation	-.067	.630**	1	.833**	-.142	.803**
	Sig. (2-tailed)	.627	.000		.000	.302	.000
	N	55	55	55	55	55	55
c4	Pearson Correlation	-.160	.833**	.833**	1	-.133	.845**
	Sig. (2-tailed)	.245	.000	.000		.334	.000
	N	55	55	55	55	55	55
c5	Pearson Correlation	-.049	-.051	-.142	-.133	1	.354
	Sig. (2-tailed)	.721	.711	.302	.334		.261
	N	55	55	55	55	55	55
X3	Pearson Correlation	.235	.829**	.803**	.845**	.354	1
	Sig. (2-tailed)	.084	.000	.000	.000	.261	
	N	55	55	55	55	55	55

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations					
		d1	d2	d3	d4	d5	Y
d1	Pearson Correlation	1	.172	.172	.271*	.138	.542**
	Sig. (2-tailed)		.209	.209	.046	.316	.000
	N	55	55	55	55	55	55
d2	Pearson Correlation	.172	1	.630**	.833**	-.051	.813**
	Sig. (2-tailed)	.209		.000	.000	.711	.000
	N	55	55	55	55	55	55
d3	Pearson Correlation	.172	.630**	1	.833**	-.142	.790**
	Sig. (2-tailed)	.209	.000		.000	.302	.000
	N	55	55	55	55	55	55
d4	Pearson Correlation	.271*	.833**	.833**	1	-.133	.887**
	Sig. (2-tailed)	.046	.000	.000		.334	.000
	N	55	55	55	55	55	55
d5	Pearson Correlation	.138	-.051	-.142	-.133	1	.396
	Sig. (2-tailed)	.316	.711	.302	.334		.152
	N	55	55	55	55	55	55
Y	Pearson Correlation	.542**	.813**	.790**	.887**	.396	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.152	
	N	55	55	55	55	55	55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.623	.622	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
a1	4.473	.5039	55
a2	4.527	.5039	55
a3	4.436	.5005	55
a4	4.564	.5005	55
a5	4.564	.5005	55

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.513	4.436	4.564	.127	1.029	.003	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22.564	2.510	1.5842	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.699	.404	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
b1	4.473	.5039	55
b2	4.564	.5005	55
b3	4.636	.4855	55
b4	4.655	.4799	55
b5	4.545	.5025	55
b6	4.545	.5025	55

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.570	4.473	4.655	.182	1.041	.004	6

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27.418	2.211	1.4869	6

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.627	.493	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
c1	4.545	.5025	55
c2	4.564	.5005	55
c3	4.564	.5005	55
c4	4.473	.5039	55
c5	4.018	.4078	55

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.433	4.018	4.564	.545	1.136	.055	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22.164	2.028	1.4242	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.677	.652	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
d1	4.473	.5039	55
d2	4.564	.5005	55
d3	4.564	.5005	55
d4	4.473	.5039	55
d5	4.018	.4078	55

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.418	4.018	4.564	.545	1.136	.052	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22.091	2.566	1.6018	5

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	22.0909	1.60177	55
X1	22.5636	1.58422	55
X2	27.4182	1.48687	55
X3	22.1636	1.42418	55

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.432	.209	.846
	X1	.432	1.000	.330	.336
	X2	.209	.330	1.000	.326
	X3	.846	.336	.326	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.063	.000
	X1	.000	.	.007	.006
	X2	.063	.007	.	.008
	X3	.000	.006	.008	.
N	Y	55	55	55	55
	X1	55	55	55	55
	X2	55	55	55	55
	X3	55	55	55	55

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.867 ^a	.753	.738	.81991	.753	51.697	3	51	.000	2.258

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	104.261	3	34.754	51.697	.000 ^b
	Residual	34.285	51	.672		
	Total	138.545	54			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.792	2.450		.323	.008		
	X1	.199	.077	.197	2.583	.003	.832	1.201
	X2	.132	.082	.123	3.614	.003	.839	1.192
	X3	.922	.086	.819	10.753	.000	.835	1.197

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X3	X2	X1
1	Correlations			
		X3	1.000	-.241
		X2	-.241	1.000
		X1	-.256	-.248
	Covariances			
		X3	.007	-.002
		X2	-.002	.007
		X1	-.002	.006

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.993	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.003	36.203	.02	.95	.03	.22
	3	.002	40.422	.08	.05	.34	.73
	4	.001	53.377	.89	.01	.63	.05

a. Dependent Variable: Y

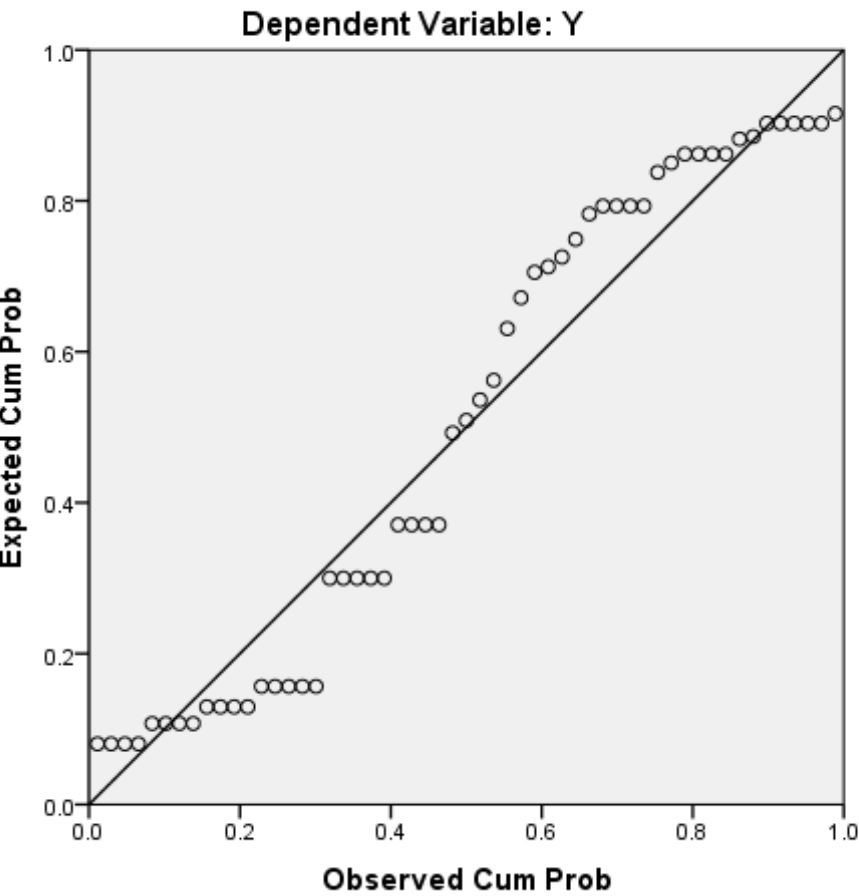
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.4497	24.9816	22.0909	1.38952	55
Std. Predicted Value	-1.901	2.080	.000	1.000	55
Standard Error of Predicted Value	.131	.330	.217	.045	55
Adjusted Predicted Value	19.3627	24.9794	22.0868	1.39070	55
Residual	-1.14951	1.12820	.00000	.79681	55
Std. Residual	-1.402	1.376	.000	.972	55
Stud. Residual	-1.429	1.394	.002	1.004	55
Deleted Residual	-1.19479	1.15763	.00410	.85129	55
Stud. Deleted Residual	-1.444	1.407	.002	1.009	55
Mahal. Distance	.391	7.772	2.945	1.632	55
Cook's Distance	.000	.030	.017	.010	55
Centered Leverage Value	.007	.144	.055	.030	55

a. Dependent Variable: Y

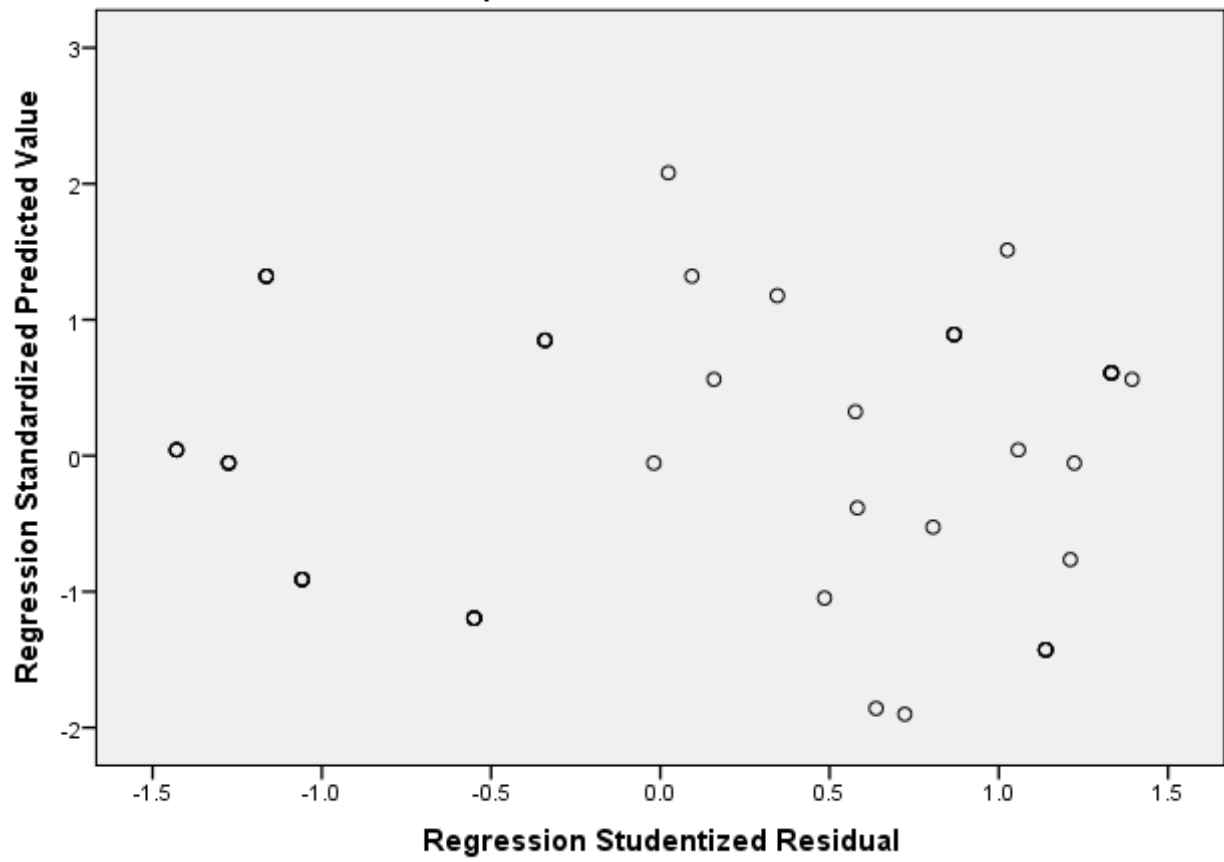
Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: Y



Lampiran II
TABULASI DATA

NO	X1					X2						X3					Y				
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	b3	b4	b5	b6	c1	c2	c3	c4	c5	c1	c2	c3	c4	c5
1	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3
2	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
3	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	5	5	3
4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5
5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
6	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
8	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
9	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5
10	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4
11	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	3
13	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
14	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5
15	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4
17	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4
18	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4
19	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4
20	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
22	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4
23	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
24	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4
25	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4
29	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4
30	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4
31	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4
32	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4

